

ABSTRAK

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pelaksanaan Perjanjian Kredit dengan sistem KREASI (Kredit Angsuran Fidusia) serta mengetahui kendala apa saja yang dihadapi dalam pelaksanaan perjanjian kredit kreasi di PT Pegadaian Cabang Jambi. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan menggunakan teori perjanjian dan teori penyelesaian sengketa. Data diperoleh dari studi kepustakaan dan lapangan. Data diambil secara kualitatif dan hasil analisis disajikan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak dan kewajiban debitur sebagai penerima pinjaman sekaligus pemberi fidusia telah tercantum dalam sebuah perjanjian kredit kreasi yang dibuat oleh pihak Pegadaian yang mana di dalamnya termuat klausul eksonerasi/eksemsi . Dalam Pasal 1338 Ayat (1) KUHPerdata menyatakan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah akan memiliki kekuatan yang sama dengan undang-undang bagi kedua pihak yang membuatnya. Pasal ini mengandung asas pacta sunt servanda (asas kekuatan hukum mengikat). Artinya, apabila calon debitur menyetujui dan menandatangani isi perjanjian kredit, maka pada saat itu juga lahir suatu perikatan yakni hak dan kewajiban kedua belah pihak yang mesti dipenuhi sesuai dengan yang tertulis dalam isi perjanjian. Di PT Pegadaian Cabang Jambi, hak dan kewajiban tersebut tidak selalu dapat terpenuhi sebagaimana mestinya. Ada kalanya debitur lalai atau bahkan tidak melaksanakan kewajibannya dalam membayar angsuran kredit yang sudah diperjanjikan karena beberapa alasan. Faktor-faktor yang menyebabkan debitur ingkar janji (wanprestasi) adalah ekonomi, kelalaian, dan kesadaran hukum debitur itu sendiri.

Kata Kunci: Pegadaian, Perjanjian Kreasi, Wanprestasi

ABSTRACT

The aim of this research is to find out and analyze how credit agreements with a fiduciary system are implemented and to find out what obstacles are faced in implementing fiduciary system credit agreements at PT Pegadaian Jambi Branch. This research uses agreement theory and dispute resolution theory. Data obtained from literature and field studies. Data was taken qualitatively and the results of the analysis were presented descriptively. The research results show that the debtor's rights and obligations as a loan recipient and fiduciary have been stated in a credit agreement made by Pegadaian which contains an exoneration/exemption clause. Article 1338 paragraph (1) of the Civil Code states that every agreement made legally will have the same force as the law for both parties making it. This article contains the principle of pacta sunt servanda (the principle of binding legal force). This means that if the prospective debtor agrees and signs the contents of the credit agreement, then at that moment an agreement is created, namely the rights and obligations for both parties which must be fulfilled according to what is written in the contents of the agreement. At PT Pegadaian Jambi Branch, these rights and obligations cannot always be fulfilled as they should be. There are times when debtors are negligent or even do not carry out their obligations in paying the agreed credit installments for several reasons. The factors that cause debtors to break their promises (default) are economic, negligence and the debtor's own legal awareness.

Key words: pawnshop, kreasi agreement, default